

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR    TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA PONTIANAK



**TAHUN  
2022**

# **RENCANA KERJA**

BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA  
PONTIANAK

Jl. Letnan Jendral Sutoyo No. 71



## **KATA PENGANTAR**

Pembuatan Rencana Kerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang baik. Rencana kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020 - 2024. Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Renja disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Demikian penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 dibuat sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi BPBD Kota Pontianak, dan dapat memberikan kontribusi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, April 2021  
BPBD Kota Pontianak  
Kepala Pelaksana

**Ir. Haryadi S. Triwibowo**  
NIP. 19630227 199003 1 006



## Daftar Isi

Cover .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	33
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD .....	40
2.4 Review terhadap rencana awal OPD .....	42
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	46
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD .....</b>	<b>47</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	47
3.2 Tujuan dan sasaran renja BPBD.....	50
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>65</b>
4.1 Rencana kerja BPBD.....	65
4.2 Pendanaan program kerja BPBD .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>



## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Program Umum BPBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 .....	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat BPB Tahun Anggaran 2020 .....	17
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d tahun 2020.....	26
Tabel 2.4 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Pontianak .....	34
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.....	43
Tabel 2.6 Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan .....	46
Tabel 3.1 Keterkaitan (Interelasi) visi, misi tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024 BPBD Kota Pontianak .....	52
Tabel 3.2 Usulan Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2022 .....	55



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Organisasi Peringkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja. Rencana Kerja yang disusun merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak tahun 2022 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020 - 2024. Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Rencana Kerja ini sejalan dengan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu *"Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"*. Renja ini ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan



Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);





16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak untuk tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat



untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.



## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU**

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2020 dan capaian Renstra BPBD, Analisis kinerja pelayanan BPBD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, Review terhadap rencana awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD**

Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran target Kinerja BPBD 1 (satu) tahun kedepan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

Memuat telaahan terhadap Rencana Kinerja yang menjelaskan Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD 1 (satu) tahun kedepan

## **BAB V. PENUTUP**

Ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja BPBD.



## BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPBD Kota Pontianak yaitu **membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana.**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait



dengan tugas dan fungsinya.

Tahun Anggaran 2020 alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak sebesar Rp. 1.807.960.237,80 ,- terealisasi sebesar Rp. 1.534.823.337,00 atau 84,89% yang dilaksanakan melalui 12 (tigabelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Dari dana tersebut dijabarkan kedalam program umum dan pembangunan, dengan rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Program Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020**

No	Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>565.375.337</b>	<b>517.655.629</b>	<b>91,56</b>
	- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	78.255.657	56.336.994	71,99
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.938.400	88.365.491	99,36
	- Penyediaan alat tulis kantor	25.368.280	24.993.996	98,52
	- Penyediaan barang cetakandan penggandaan	15.810.000	15.709.056	99,36
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.205.000	2.204.235	99,97



No	Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.920.000	98,40
	- Penyediaan makanan dan minuman	51.620.000	51.077.955	98,95
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.000.000	32.858.502	86,47
	- Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran	8.804.000	4.858.000	55,18
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	189.204.000	180.825.000	95,57
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58.760.000	54.906.400	93,44
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	3.410.000	600.000	17,60
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor</b>	<b>145.230.000</b>	<b>138.263.853</b>	<b>95,20</b>
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	110.420.000	109.446.338	99,12
	- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	28.910.000	26.077.815	90,20
	- Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.900.000	2.739.700	46,44
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pendidikan dan pelatihan formal	0	-	0
<b>4</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>98,93</b>
	- Penyusunan Rencana Kerja	500.000	485.000	97
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	900.000	900.000	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
5	<b>Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur</b>	<b>36.062.000</b>	<b>36.062.000</b>	<b>100</b>
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36.062.000	36.062.000	100
	<b>Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>
	- Penyusunan Laporan Keuangan	500.000	500.000	100
6	<b>Program peningkatan pelayanan prima</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>99,23</b>
	- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.300.000	1.290.000	99,23
7	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>98,68</b>
	- Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah	2.275.000	2.245.000	98,68
8	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>
	-Pengelolaan Website	20.000.000	20.000.000	100

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.565.375.337,- dan terealisasi sebesar Rp.517.655.629,- atau 91,56%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut :

#### 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tagihan rekening telephone, air, listrik dan internet dengan capaian kinerja selama 12 bulan.



1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya belanja peralatan service, serta jasa cleaning service dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pelayanan untuk administrasi kantor dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan yang optimal dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terciptanya penerangan kantor yang memadai dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya langganan media massa dengan capaian kinerja g y selama 12 bulan.

1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya makan, minum, makan rapat, tamu, lembur dan penambah daya tahan tubuh dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Keluaran kegiatan ini adalah peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dengan capaian kinerja selama 12 bulan.





1.9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa perkantoran selama 12 bulan.

1.10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah,

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah berupa rapat-rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan.

1.11 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya honor pengelola keuangan dan pengelola kegiatan dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

1.12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa PC Unit sebanyak 2 unit, Mesin Finger Print sebanyak 1 unit, Baterai Drone sebanyak 1 unit, Kulkas sebanyak 1 unit, AC Split sebanyak 1 unit, Sepeda Patroli sebanyak 1 unit, dan Printer sebanyak 2 unit.

**2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan kantor**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.230.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 138.263.853,- atau 95,20%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut :

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan pejabat eselon II sebanyak 1 unit, kendaraan roda



dua sebanyak 4 unit, kendaraan patroli sebanyak 1 unit dan speedboat sebanyak 4 unit.

## 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor berupa personal komputer 11 unit, laptop sebanyak 6 unit, printer sebanyak 17 unit dan AC sebanyak 12 unit.

## 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan telah dianggarkan pada awal tahun namun anggaran tersebut dialikan untuk refocusing penanganan COVID-19.

### 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keluaran kegiatan ini adalah adanya diklat/bimtek/workshop/kursus dan lain-lain demi terpenuhinya peningkatan kualitas SDM BPBD Kota Pontianak. Kegiatan ini tidak teralisasi dikarenakan COVID-19 sehingga semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan khalayak ramai tidak diperkenankan dan hanya dilaksanakan melalui zoom (via online).

## 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.400.000,- terealisasi sebesar Rp.1.385.000,- atau 98,93%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini sebagai berikut :



#### 4.1. Penyusunan Rencana Kerja

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 7 (tujuh) dokumen perencanaan, yang meliputi dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKT, RKA, RKA Perubahan dan SAKIP.

#### 4.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 5 (lima) dokumen laporan capaian kinerja yang meliputi dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, dan SPIP dan SPM.

### 5. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.062.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.062.000,- atau 100%.

#### 5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 44 stell, dan pakaian petugas kebersihan sebanyak 2 stell. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk keseragaman aparatur dalam berpakaian sehingga berdampak pada peningkatan disiplin dan semangat kerja aparatur.

### 6. **Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan**

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.500.000,- atau 100%



#### 6.1 Penyusunan Laporan Keuangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 7 (tujuh) Dokumen Laporan Keuangan yang terdiri dari Buku Besar, LRA, LO, RO, Neraca, SPJ dan CALK.

### 7. Program Peningkatan Pelayanan Prima

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1,290.000,- atau 99.23%.

#### 7.1 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 2 dokumen.

### 8. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.2450.000,- atau 98,68%.

#### 8.1 Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah

Keluaran kegiatan ini tersusunnya Profil BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen.

### 9. Program Pengembangan Sistem Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%.

### 9.1 Pengelolaan Website

Keluaran kegiatan ini terlaksananya pengelolaan Website BPBD dan Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini (SIPD) Bencana selama 12 bulan, dengan tujuan untuk memberitahukan informasi secara luas tentang Bencana maupun penanggulangannya. Dengan alamat website <http://bpbd.pontianakkota.go.id>

Selain program rutin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak juga melaksanakan program pembangunan yang mendukung urusan bidang penanggulangan bencana. Jumlah program dan kegiatan yang mendukung program pembangunan urusan ini sebanyak 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

Rincian pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pelaksanaan Program Pembangunan**  
**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	<b>Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>759.519.900</b>	<b>597.883.855</b>	<b>78,72</b>
	1. Respon Cepat darurat Bencana	899.900	-	0
	2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	17.720.000	-	0



No	Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
	3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	607.370.000	504.543.390	83,07
	4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	133.530.000	93.340.465	69,90
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>101.536.000</b>	<b>62.115.000</b>	<b>61,18</b>
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana	16.575.000	-	0
	2. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	84.961.000	62.115.000	73,11
<b>3</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>122.940.000</b>	<b>109.857.000</b>	<b>89,36</b>
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	0	-	0
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	14.674.000	13.054.000	88,96
	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	0	-	0
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	50.816.000	46.843.000	92,18
	5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	49.640.000	48.210.000	97,12
	6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	7.810.000	1.750.000	22,41
<b>4</b>	<b>Program Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>51.822.000</b>	<b>47.566.000</b>	<b>91,79</b>
	1. Pembentukan dan pembinaan kelurahan tangguh bencana	51.822.000	47.566.000	91,79
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp1.035.817.900,-</b>	<b>Rp. 817.421.855,-</b>	<b>78.92 %</b>

Sumber :BPBD Kota Pontianak, Tahun Anggaran 2020 (sebelum diaudit BPK)

Dari tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebesar



Rp.1.035.817.900,- dengan realisasi mencapai 78,92 % atau sebesar Rp. 817.421.855,-.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang mendukung program pembangunan urusan ini adalah sebanyak 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

#### **10. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.759.519.900,- dan telah terealisasi sebesar 78,72% atau Rp.597.883.855,-.

##### **10.1 Respon Cepat Darurat Bencana**

Output atau keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan piket Tim Reaksi Cepat (TRC). Kegiatan ini merupakan kegiatan piket kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana yang melibatkan seluruh anggota Tim Reaksi Cepat, dengan tujuan agar saat terjadinya bencana, anggota TRC selalu siap dan tanggap dalam menanggulangi bencana. Tim piket juga berkewajiban melakukan patroli dan membuat laporan guna memantau daerah-daerah rawan bencana, agar selalu terjaga kondisi yang kondusif. Jumlah petugas piket setiap harinya adalah sebanyak 3 orang selama 7 hari dalam seminggu.

## 10.2 Aktivasi Sistem Komando

Kegiatan ini merupakan kegiatan tanggap darurat bencana, yang mengakomodir seluruh biaya yang ada saat terjadi situasi tanggap darurat ketika telah dikeluarkannya SK Komando Tanggap Darurat Bencana. Namun pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena mekanisme penetapan status bencana tidak diterapkan.

## 10.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani dengan target 100%. Selama tahun 2020 kejadian bencana yang terjadi di Kota Pontianak adalah sebanyak **14 kejadian yakni 1 kali banjir, 2 kali karhutla, dan 11 kali bencana puting beliung**. Dari total kejadian tersebut telah dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan kepada total jumlah korban jiwa sebanyak **3.894 jiwa**. Selain itu kegiatan ini juga mengakomodir biaya **penyemprotan disinfektan** dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Pontianak dengan total penyemprotan sebanyak **1230 kali** terdiri dari **387 kali di Instansi Pemerintah, 810 kali di Fasilitas Umum, 20 kali di Kantor/PT Swasta, 8 kali di Lembaga Pendidikan, 3 kali di Lembaga Kesehatan, 1 kali di Lembaga Keuangan, dan 1 kali di Toko/Warung Kopi**. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan sejak dikeluarkannya SK Penanganan tanggap darurat COVID-19 dari walikota hingga akhir tahun tergantung permintaan dari



pihak external. Selain itu penyemprotan disinfektan juga dapat dilakukan oleh pihak luar dengan BPBD sebagai penyedia disinfektan. Total Jumlah disinfektan yang disalurkan selama tahun **2020 adalah 20.431 liter** yang disalurkan melalui **Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Pemadam Kebakaran Swasta, Instansi, RT/RT dan Masyarakat Umum.**

#### 10.4 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Output atau keluaran kegiatan ini adalah persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dasar. Pada Tahun 2020 jumlah bencana yang mendapat bantuan dasar adalah sebanyak **14** kejadian bencana yaitu bencana kebakaran bangunan. Dari total kejadian tersebut, telah diberikan bantuan berupa kebutuhan dasar (makanan siap saji) selama 3 hari, bantuan logistik, bantuan sandang, perlengkapan bayi dan lain sebagainya, yang bersumber dari dana APBD maupun dari BNPB berupa *buffer stock* yang selalu tersedia di gudang BPBD Kota Pontianak kepada **57 KK (kepala keluarga)** dengan total jiwa sebanyak **218 jiwa**.

### 11. Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.115.000,- dan telah terealisasi sebesar 61,18% atau Rp.39.421.000,-.

#### 11.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak. Dokumen



Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak telah tersedia dan berlaku sejak tahun 2017 sampai dengan 2021.

#### 11.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi tatap muka, Pemasangan rambu peringatan dini, dan Pameran Sadar Bencana. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan peserta berasal dari TRC BPBD Kota Pontianak dan Relawan dari berbagai komunitas yang ada di Kota Pontianak dengan tujuan dapat meningkatkan wawasan dan sadar bencana. Selain melalui sosialisasi tatap muka penyampaian informasi juga dilaksanakan melalui sarana informasi peringatan dini kebakaran lahan. Sarana informasi yang dimaksud berupa pemasangan papan peringatan dini, brosur/famplet maupun spanduk di beberapa wilayah yang rawan kebakaran lahan. Namun untuk pameran sadar bencana pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak.

### **12. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.940.000,- dan telah terealisasi sebesar 89,36% atau Rp.109.857.000,-.

#### 12.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak. Dokumen

Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak telah tersedia dan berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan 2023.

#### 12.2 Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Kontinjensi (Rekon). Pembuatan Rencana Kontinjensi (kebakaran hutan dan lahan) dilaksanakan dengan mengundang berbagai instansi terkait penanggulangan bencana seperti dinas kesehatan, dinas perkim, dinas sosial, dinas LH, tni/polri, kecamatan dan kelurahan, bpbd provinsi, damkar, pmi juga komunitas relawan kemanusiaan seperti rumah zakat dll. Pada Tahun 2020, dokumen Renkon yang disusun adalah Dokumen Renkon Penanggulangan Karhutla sehingga dokumen ini dapat digunakan untuk pedoman teknis semua pihak terkait ketika terjadi bencana karhutla dari skala kecil hingga skala besar.

#### 12.3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah warga negara yang mendapat pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat umum dalam mengurangi risiko bencana melalui dari pemberian materi singkat tentang kebencanaan dan simulasi kejadian bencana. Namun pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena pandemi COVID-19.

#### 12.4 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah warga negara dan aparatur yang mendapat pelatihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Pembuatan Renkon.

Dalam dokumen Renkon terdapat pedoman teknis penanggulangan karhutla sehingga kegiatan ini merupakan praktek atau gladi dari dokumen Renkon penanggulangan karhutla tersebut.

#### 12.5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Keluaran kegiatan ini adalah koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah jenis sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Namun pada tahun 2020 kegiatan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak dilakukan karena mekanisme penerapan pusdalops tidak diterapkan. Sementara itu pengadaan peralatan dan penanggulangan bencana pada tahun 2020 berupa selang penghantar sebanyak 6 roll, sepatu pengaman sebanyak 10 pasang, kopleng sambungan, sebanyak 1 unit, nozel sebanyak 2 unit.

#### 12.6 Penyusunan Standar Operasional (SOP)

Output dari kegiatan ini adalah dokumen SOP yang tersusun. Pada tahun 2020 telah dilakukan revisi SOP yang ada dengan mengganti dan menambah SOP yang tidak relevan dengan tupoksi dan program kegiatan di BPBD Kota Pontianak.

### 13. Program Kelurahan Tangguh Bencana

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.822.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.566.000,- atau 91,79%



### 13.1 Pembentukan dan pembinaan kelurahan tangguh bencana

Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya kelurahan tangguh bencana. Untuk tahun 2020, ditargetkan 1 (satu) kelurahan yang terbentuk, yaitu Kelurahan Bansir Darat di Kecamatan Pontianak Selatan. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan melibatkan unsur kelurahan dan masyarakat setempat, dengan harapan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengurangi risiko bencana.



**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak s/d Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)			
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
	Bidang Urusan : Penanggulangan Bencana											
1	05	02.00.23	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Penurunan wilayah terdampak bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	
1	05	02.00.23	001 Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan	-	1 kelurahan	1 kelurahan	100%	1 kelurahan	2 kelurahan	100%
1	05	02.00.21	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana sesuai SPM	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	05	02.00.21	001 Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen kajian resiko bencana	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0	0
1	05	02.00.21	002 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui tatap muka	15 kali	-	-	-	-	3 kali	3 kali	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)			
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media masa dan wahana multi media	10 media	-	-	-	-	2 media	0	0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi melalui penyediaan pemasangan papan informasi publik	5 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
		Jumlah sosialisasi melalui pameran sadar bencana	5 kali	-	-	-	-	1 kali	0	0		
1	05	02.00.21	<b>Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
1	05	02.00.22	002	Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Jumlah dokumen rencana Kontijensi ( Renkon )	5 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	05	02.00.22	003	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Jumlah pelatihan pencegahan dan simulasi bencana yang terlaksana	100 kali	-	-	-	20 kali	0	0
1	05	02.00.22	004	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan yang terlaksana	5 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
1	05	02.00.22	005	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah jenis sarana dan prasarana penanggulangan bencana	5 kali	-	-	-	1 kali	0	0
						35 jenis	-	-	-	7 jenis	7 jenis	100%
1	05	02.00.22	007	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen Standar Pelayanan Prosedur ( SOP )	10 SOP	-	-	-	2 SOP	2 SOP	100%
1	05	02.00.20		<b>Program Pelayanan Penyelamatan</b>	<b>Persentase warga negara yang</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)				
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
	<b>dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>											
1	05	02.00.20	001	Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah dokumen kaji cepat dan jumlah hari piket	1 dok 365 hari	-	-	-	1 dok 365 hari	1 dok 365 hari	100%	
1	05	02.00.20	002	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah kegiatan koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana ( aktivasi posko tanggap darurat )	15 kali	-	-	-	3 kali	0	0	
1	05	02.00.20	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana penyelamatan dan evakuasi	Setiap kejadian bencana	-	-	-	Setiap kejadian bencana	Setiap kejadian bencana	100%	
1	05	02.00.20	004	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhan dasar kehidupan	Setiap korban bencana	-	-	-	Setiap korban bencana	Setiap korban bencana	100%	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02.00.01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	05	02.00.01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan air, listrik, telpon, dan internet	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 05 02.00.01 004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui media massa	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 009	Penyediaan Makanan dan Miinum	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan daya tahan tubuh	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 011	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan jasa teknis administrasi perkantoran	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 05 02.00.01 012	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 015	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran honorarium / jasa administrasi keuangan sesuai peraturan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.01 142	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
<b>1 05 02.00.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pelengkapan Kantor</b>	<b>Meningkatkan pelayanan publik Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02.00.02 012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
1 05 02.00.02 026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan, mesin kantor dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
	Perizinan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
<b>1 05 02.00.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02.00.05 002	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 dok	100%	1 kegiatan	0	0
<b>1 05 02.00.06</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan capaian kinerja</b>	<b>80 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>100%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Capaian Kinerja</b>									
1 05 02.00.06 001	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen rencana kerja	35 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
1 05 02.00.06 004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	45 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
1 05 02.00.07	<b>Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin kerja Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02.00.07 006	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	230 stell	46 stell	46 stell	46 stell	100%	46 stell	46 stell	100%
1 05 02.00.08	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya penyusunan laporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02.00.08 001	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan	35 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
1 05 02.00.09	<b>Program Peningkatan Pelayanan Prima</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
1 05 02.00.09 001	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Diketahui tingkat kepuasan masyarakat	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1 05 02.00.10	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Tersedianya data dan informasi tentang BPBD Kota Pontianak</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1 05 02.00.10 001	Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya buku profil BPBD Kota Pontianak	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	1 buku	100%
1 05 02.00.11	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi</b>	<b>Tersedianya informasi melalui website</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2019 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 05 02.00.11 001	Pengelolaan Website	Updating data dan informasi	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah.

Sesuai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan SPM. Adapun target dan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai untuk tahun 2020-2021 dan target serta proyeksi untuk tahun 2022 - 2023 pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.4**

**Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)			0.50	0.53	0.55	0.58	0.50	-	0.55	0.58	
2	Persentase Penurunan Warga Terdampak Bencana			0%								Indikator ini hanya di gunakan untuk tahun 2020



Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kota Pontianak untuk tahun 2020 sebagai berikut :

**a. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 yaitu Terwujudnya Kota yang Aman dan Tertib yang tercermin dengan capaian Indikator dari Indeks Kapasitas Daerah (IKD) secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

*Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020*

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,50	0,50*	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020

Ket \*) : Berdasarkan perhitungan mandiri

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Kapasitas Daerah.

Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi



bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2019 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,47. Pada tahun 2020 realisasi perhitungan IKD Kota Pontianak adalah sebesar 0,50, atau naik sebesar 0,03 dari IKD tahun sebelumnya. Dengan kata lain Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak sebesar 0,50 sama dengan nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2020, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah “Sangat Berhasil”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100%.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini adalah :





Program Kelurahan Tangguh Bencana Dengan kegiatan pendukungnya yaitu :

- Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana

Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dengan kegiatan pendukungnya yaitu :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- Komunikasi Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Dengan kegiatan pendukungnya yaitu :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

#### **b. Persentase Penurunan Warga yang Terdampak Bencana**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 yaitu Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat yang tercermin dengan capaian Indikator dari Persentase Penurunan Warga Yang Terdampak Bencana secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



*Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020*

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat	Persentase Penurunan Warga Yang Terdampak Bencana	10%	0	0

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020*

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator Persentase Penurunan Warga Yang Terdampak Bencana.

Warga Yang Terdampak Bencana atau korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Persentase penurunan warga yang terdampak bencana dihitung dari jumlah warga yang terdampak bencana ditahun sebelumnya (2019), dikurangi 10% target ditahun 2020.

Jumlah kejadian bencana di tahun 2019 terjadi sebanyak 97 kejadian bencana, dengan total jumlah korban jiwa terdampak sebanyak 287 jiwa. Jika target yang diharapkan di tahun 2020 adalah persentase jumlah korban bencana yang berhasil diturunkan adalah 10%, maka korban jiwa di tahun 2019 yang



berjumlah 287 jiwa, berhasil diturunkan menjadi 258 jiwa yang terdampak bencana di tahun 2020.

Dari target indikator capaian tersebut, jumlah kejadian bencana yang telah terjadi di tahun 2020 adalah sebanyak 14 kejadian bencana dengan jumlah korban jiwa terdampak sebanyak 3.894 jiwa. Jumlah korban jiwa yang terdampak bencana di tahun 2020 jauh melebihi jumlah target capaian yang seharusnya hanya 258 jiwa. Hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi bencana puting beliung yang sangat besar dengan cakupan wilayah yang terdampak cukup luas, hingga menyebabkan Walikota Pontianak harus menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Puting Beliung melalui Keputusan Walikota Pontianak dengan Nomor 640 / BPBD / Tahun 2020. Dengan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi tersebut, maka untuk indikator capaian kinerja Persentase Penurunan Warga Yang Terdampak Bencana tidak dapat direalisasikan atau dengan kata lain capaian kinerja untuk indikator tersebut “Sangat Rendah”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 0%.

Adapun program pendukung indikator sasaran ini adalah Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban, dengan kegiatan pendukungnya yaitu :

- Respon Cepat Darurat Bencana;
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar korban Bencana.



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD**

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kota Pontianak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD terdapat Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana dan juga dibantu oleh Relawan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi di Kota Pontianak adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Disamping itu BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Kompleksnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, BPBD Kota Pontianak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan seiring dengan permasalahan yang timbul dalam perkembangan Kota Pontianak, khususnya dari segi pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kota Pontianak, yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pontianak :

1. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.
2. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim.
3. Bencana asap pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak dan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat lainnya berdampak pada kondisi udara di Kota Pontianak. Kebakaran lahan dipicu oleh pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian.
4. Adanya Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang larangan membakar lahan, merupakan issue strategis dalam mengurangi

kejadian kebakaran lahan, namun perwa ini masih perlu sosialisasi dan koordinasi antar instansi dalam penerapannya.

5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir.

## **2.4 Review terhadap Rencana Awal BPBD**

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak. Disamping itu, dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Review terhadap rancangan awal BPBD ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BPBD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD. Review terhadap Rancangan Awal BPBD tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :



**Tabel 2.5**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi	100%	877.430.122	Program Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi	100%		
1.1	Pelayanan Infromasi Rawan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	89.543.825	Pelayanan Infromasi Rawan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	299.060.226	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	486.010.350	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%		



			evakuasi korban bencana					dan evakuasi korban bencana			
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase SOP yang dibuat	100%	2.815.721	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase SOP yang dibuat	100%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	3.894.419.878	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%		
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen/laporan	16.515.135	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen/laporan		
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan	2.976.604.820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan		
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	20 orang	42.443.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	20 orang		
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	247.628.619	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan		





*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	329.272.954	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12 bulan	281.854.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12 bulan		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini dimaksudkan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.

BPBD Kota Pontianak akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, organisasi kemasyarakatan, pemadam kebakaran swasta, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi BPBD dari pengamatan di lapangan dan melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**Tabel 2.6**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 Kota Pontianak**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	RW. 25, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	10 orang	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Wilayah Kelurahan Siantan Tengah, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	5 orang	
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	5 orang	
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	RT.004 RW.006, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	10 orang	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BPBD

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara garis besar arah tujuan pembangunan nasional tertuang dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Namun untuk mempercepat capaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 maka ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Adapun 6 (enam) pengarusutamaan tersebut adalah sebagai berikut :



1. Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukkan pespektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan



(mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

#### 6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

Keenam pengarusutamaan ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Sejalan dengan 7 agenda pembangunan Nasional yang tertera di RPJMN IV tahun 2020-2024 poin ke- 6 yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” yang kemudian di fokuskan pada pengarusutamaan dan masuk pada **poin ke - 4 yaitu Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim**. Maka BNPB sebagai badan / instansi di tingkat nasional yang bertugas untuk menangani masalah-masalah kebencanaan secara global seluruh Indonesia, sementara BPBD berada di tingkat kabupaten/kota bertugas untuk membantu walikota/bupati dalam hal menanggulangi bencana dengan program-program dan kegiatan yang mendukung strategi nasional dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak



No. 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pontianak, BPBD Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana.

Sebagai pengarusutamaan, kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Dengan indikator utama yaitu penurunan indeks risiko bencana. Hal ini didukung dengan program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait termasuk BPBD Kota Pontianak sebagai salah satu pendukung urusan bidang penanggulangan bencana khususnya di daerah Kota Pontianak.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD**

Dalam Rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, memuat visi pembangunan Kota Pontianak sebagai berikut :

*“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”*

Visi tersebut kemudian di jabarkan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya



2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Sejalan dengan misi kelima Pemerintah Kota Pontianak diatas yakni “Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.”, BPBD Kota Pontianak diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan kedua dari misi walikota tersebut yakni “Terwujudnya kota yang aman dan tertib”. Dengan mengampu 1 (satu) Tujuan Utama BPBD yaitu “Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” dengan sasaran strategis BPBD “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” yang dapat di ukur dengan Indikator Utama BPBD yaitu “Indeks Kapasitas Daerah” sesuai dengan tabel keterkaitan dibawah ini:



**TABEL 3.1**  
**KETERKAITAN ( INTERELASI ) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**RENCANA STATIGIS TAHUN 2020-2024**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

Visi	Misi	Tujuan Kota	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1. Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat	2. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.	2. Terwujudnya kota yang tertib dan aman	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

*Sumber : Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024*



### **3.1 Program dan Kegiatan**

Badan Penanggulangan Bencana memiliki sasaran strategis yakni "meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana" dengan Indikator "Indeks Kapasitas Daerah" yang dapat di hitung dengan cara mengisi perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas yang memiliki 71 indikator dengan 284 pertanyaan yang dikeluarkan oleh BNPB. Maka perumusan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dilakukan dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut yang juga telah tertuang didalam dokumen Renstra.

Seiring dengan perubahan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Renstra BPBD Kota Pontianak juga mengalami perubahan. Perencanaan Strategis yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah Perubahan Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024. Selain itu Penyusunan Program kegiatan maupun indikator program dan kegiatan telah disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah



Kabupaten/Kota. Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dimaksud dirincikan sebagaimana dibawah ini:



**Tabel 3.2**  
**USULAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
									Pagu Indikatif (Rp.)		
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
1	5		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>5,462,593,038</b>		
1	5	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>3.565.019.878</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>4,543,336,814</b>	
1	5	1	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Pontianak	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>16,515,135</b>	APBD	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>19,074,658</b>



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kota Pontianak	9 dokumen	6,749,980	APBD		100%	7,796,250
1	5	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Pontianak	9 dokumen	4,634,855	APBD		100%	5,353,258
1	5	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	7 laporan	5,130,300	APBD		100%	5,925,150
1	5	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan</b>	Kota Pontianak	<b>12 bulan</b>	<b>2.647.204.820</b>	APBD		<b>12 bulan</b>	<b>3,496,353,555</b>
1	5	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 bulan	2,643,600,000	APBD		100%	3,492,189,780
1	5	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	12 bulan	3,604,820	APBD		100%	4,163,775



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	1	2		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya</b>	Kota Pontianak		<b>42,443,000</b>	APBD			<b>49,945,665</b>
1	5	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Pontianak	46 stell	29,430,000	APBD		100%	33,991,650
1	5	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Kota Pontianak	1 orang	13,013,000	APBD		100%	15,954,015
1	5	1	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Pontianak	<b>12 bulan</b>	<b>247,628,619</b>	APBD		<b>12 bulan</b>	<b>327,935,298</b>
1	5	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	12 bulan	3,179,947	APBD		100%	3,672,839
1	5	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pontianak	100%	100,992,490	APBD		100%	120,174,575



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak	12 bulan	47,000,000	APBD		100%	82,134,546
1	5	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pontianak	12 bulan	44,981,182	APBD		100%	16,036,093
1	5	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 bulan	4,000,000	APBD		100%	4,620,000
1	5	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Pontianak	12 bulan	47,475,000	APBD		100%	101,297,245
1	5	1	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Kota Pontianak	<b>12 bulan</b>	<b>329,373,954</b>	APBD			<b>439,680,721</b>



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Kota Pontianak	12 bulan	84,873,954	APBD		100%	94,725,649
1	5	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Pontianak	12 bulan	244,500,000	APBD		100%	344,955,072
1	5	1	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	Kota Pontianak	<b>12 bulan</b>	<b>281,854,350</b>	APBD		<b>12 bulan</b>	<b>210,346,917</b>
1	5	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Kota Pontianak	8 unit	181,050,350	APBD		100%	139,741,767
1	5	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pontianak	41 unit	75,804,000	APBD		100%	70,605,150



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pontianak	1 unit	10,000,000	APBD		100%	0
1	5	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pontianak	1 unit	15,000,000	APBD		100%	0
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi</b>	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>877,430,122</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>919,256,225</b>
1	5	3	2		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>89,543,825</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>97,927,468</b>





*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	3	2	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kota Pontianak	100%	89,543,825	APBD	100%	97,927,468
1	5	3	2		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>299,060,226</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>303,042,884</b>
1	5	3	2	1	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kota Pontianak	100%	0	APBD	100%	18,103,300
1	5	3	2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Kota Pontianak	100%	59,601,999	APBD	100%	11,988,667



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	3	2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Kota Pontianak	100%	96,441,475	APBD	100%	98,873,826
1	5	3	2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Kota Pontianak	100%	20,000,000	APBD	100%	22,000,000
1	5	3	2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Kota Pontianak	1 kelurahan	55,488,700	APBD	100%	79,114,298
				Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk		1 sekolah						



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	3	2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	16,618,392	APBD		100%	21,619,743
1	5	3	2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	Kota Pontianak	100%	50,909,660	APBD		100%	51,343,050
1	5	3	2		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>486,010,350</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>515,051,323</b>
1	5	3	2	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kota Pontianak	100%	159,728,200	APBD		100%	145,042,821



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

1	5	3	2	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kota Pontianak	100%	171,700,000	APBD	100%	178,563,000
1	5	3	2	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik	Kota Pontianak	100%	149,332,150	APBD	100%	179,350,883
1	5	3	2	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kota Pontianak	100%	5,250,000	APBD	100%	12,094,619
1	5	3	2		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase SOP yang dibuat</b>	Kota Pontianak	<b>100%</b>	<b>2,815,721</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>3,234,550</b>
1	5	3	2	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SOP yang dibuat	Kota Pontianak	2 SOP	2,815,721	APBD	100%	3,234,550
<b>TOTAL</b>									<b>4.442.450.000</b>			<b>5,462,593,038</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

#### **4.1 Rencana Kerja BPBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga sosial dituntut untuk menghasilkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja BPBD merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) BPBD. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (Renja).

Sejalan dengan misi kelima Pemerintah Kota Pontianak yakni “Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan”, BPBD Kota Pontianak diharapkan dapat membuat program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan kedua dari misi tersebut yakni “Terwujudnya kota yang aman dan tertib” dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam proses penyusunan program dan kegiatan Renja BPBD Kota Pontianak Tahun 2022, selain mengacu pada misi dan tujuan Kepala Daerah di atas, juga tetap mengacu pada Perubahan Renstra BPBD Kota Pontianak periode 2020 - 2024. Penyusunan Program dan kegiatan juga sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program kegiatan dan subkegiatan yang dimaksud meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan:
  - (1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- (3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- (4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Penanggulangan Bencana
- (1). Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
  - (2). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
    - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - (3). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - (4). Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana





- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

#### **4.2 Pendanaan Program Kerja BPBD**

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pembagian dana berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<b>BIDANG</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP)</b>
Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Kegiatan	19 Sub Kegiatan	3.565.019.878
Bidang Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	13 Sub Kegiatan	877.430.122

## **BAB V PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan visi dan misi Walikota Pontianak. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 juga merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Periode 2020–2024, dimana Renja ini menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2022 dengan tujuan untuk mendukung pencapaian misi kelima RPJMD Kota Pontianak, yaitu: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Demikianlah Renja tahun anggaran 2022 ini dibuat. Harapan kami Renja ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, sehingga perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO